



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.649003/2021**

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |                                                                                        |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                                             |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)     | Ditjen Pemasyarakatan                                                                  |
| 3. Provinsi                   | : (30)     | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                                                              |
| 4. Kode/Nama Satker           | : (649003) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                              |
| Sebesar                       | : Rp.      | 772.182.000 ( TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| 03    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN |
| 03 05 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN  |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- |                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 013 05 BF      | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum     |
| 013.05.BF.5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah |

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	772.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBSN-PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN PANGKAL PINANG | (015) Rp. | 772.182.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A. N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ttd  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.649003/2021**



DS:2301-3024-8117-6809

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |                   |                                                                            |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)           | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                                 |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)            | Ditjen Pemasarakatan                                                       |
| 3. Provinsi                   | : (30)            | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                                                  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (649003)        | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                  |
| Sebesar                       | : Rp. 772.182.000 | ( TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 772.182.000
013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 772.182.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	772.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PANGKAL PINANG	(015) Rp.	772.182.000
------------------------	-----------	-------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	772.182.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	772.182.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Jumlah Layanan Perkantoran	
	: 3. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	
	: 4. 01	Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasarakatan	
	: 5. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 6. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 7. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 8. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 9. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 10. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 11. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 12. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	: 13. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
	: 14. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 15. 02	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 16. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 17. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 18. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	: 19. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 20. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 21. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	
	: 22. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 2

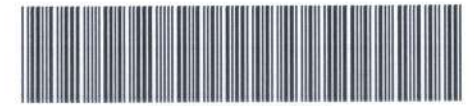
---

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

23. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
24. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
25. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
26. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
27. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
28. 03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
29. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
30. 04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
31. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
32. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
33. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
34. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
35. 04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
36. 05	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)
37. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
38. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
39. 06	Jumlah Layanan Perkantoran
40. 06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
41. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
42. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
43. 07	Jumlah Kendaraan Bermotor
44. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
45. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

---

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 3

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
	46.	08		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		
	47.	08		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba		
	48.	09		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
	49.	10		Jumlah Gedung/Bangunan		
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan 299.354.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah	10,00	kegiatan 299.354.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	36,00	orang 198.668.000
Rincian Output	:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	36,00	orang 198.668.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi 274.160.000
Rincian Output	:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi 274.160.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021

I B. SUMBER DANA



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	772.182.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	772.182.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 1  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	-	772.182	-	-	-	772.182		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	772.182	-	-	-	772.182		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	772.182	-	-	-	772.182		
5252.AEA	Koordinasi (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	299.354	-	-	-	299.354	30.51	
01	RM	-	299.354	-	-	-	299.354	015	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	198.668	-	-	-	198.668	30.51	
01	RM	-	198.668	-	-	-	198.668	015	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	274.160	-	-	-	274.160	30.51	
01	RM	-	274.160	-	-	-	274.160	015	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>772.182</b>	-	-	-	<b>772.182</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
 Reynhard Silitonga  
 NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649003) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	72.432	78.544	119.131	12.053	182.381	39.085	51.425	83.216	13.845	59.287	60.783	772.182
		BELANJA BARANG	0	72.432	78.544	119.131	12.053	182.381	39.085	51.425	83.216	13.845	59.287	60.783	772.182
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	72.432	78.544	119.131	12.053	182.381	39.085	51.425	83.216	13.845	59.287	60.783	772.182
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	72.432	78.544	119.131	12.053	182.381	39.085	51.425	83.216	13.845	59.287	60.783	772.182

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649003] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

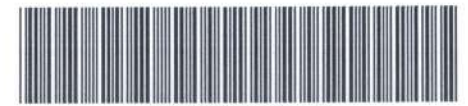
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.649003/2021  
IV B. C A T A N**



DS:2301-3024-8117-6809

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649003] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitunga  
NRP 67090332